

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH

PROGRAM : PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Tujuan : Meningkatkan penggunaan transaksi elektronik dalam pembayaran pendapatan daerah.	Penggunaan ETPD meningkat, namun belum seluruh wajib pajak memanfaatkan layanan elektronik dan belum tersedia data pengguna terpilah gender.	Akses : Perempuan belum seluruhnya memiliki akses dan kemampuan menggunakan layanan digital. Partisipasi : - Partisipasi penggunaan kanal pembayaran digital masih didominasi oleh wajib pajak laki-laki dan pelaku usaha formal. Kontrol : - Perempuan pelaku usaha sering memiliki kontrol terbatas terhadap akses akun keuangan digital atau sistem pembayaran online.	Belum tersedia data terpilah gender dan sosialisasi belum mempertimbangkan aspek gender.	- Perbedaan literasi digital dan akses teknologi antara laki-laki dan perempuan. - Infrastruktur digital belum merata di wilayah pinggiran	Mewujudkan sistem ETPD yang inklusif gender, meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah	Sosialisasi ETPD, penyediaan data terpilah gender, dan monitoring pemanfaatan layanan elektronik.	- Persentase pengguna ETPD saat ini masih didominasi laki-laki - Rendahnya data terpilah gender dalam sistem pajak daerah - Tingkat literasi digital perempuan lebih rendah dibanding laki-laki (di beberapa wilayah)	Input : - Tersedianya Anggaran - Data pengguna terpilah gender tersedia. Output : - Sosialisasi ETPD terlaksana. Outcome : - Meningkatnya penggunaan ETPD oleh laki-laki dan perempuan. - Meningkatnya inklusi keuangan digital di masyarakat

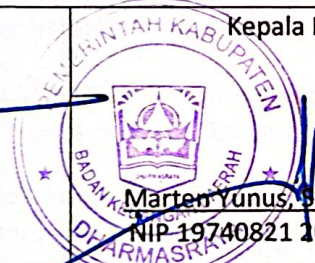
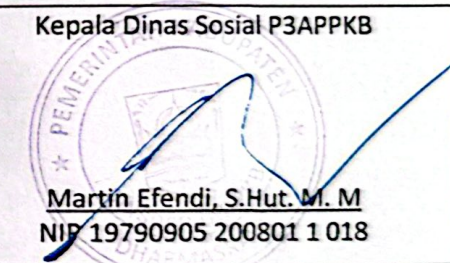
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
		Manfaat : ▪ Kemudahan layanan belum dirasakan merata.						

Pulau Punjung, 23 Juni 2026

KEPALA BKD

Marten Yunus, S.Kom. M.Eng
NIP 19740821 200212 1 001

Tim Verifikasi

Inspektur  Rahmadani, S.H., M.H. NIP 19760830 20012 1 001	Kepala BKD  Marten Yunus, S.Kom. M.Eng NIP 19740821 200212 1 001	Kepala Bapperida  Frinaldi, S.T., M.Sc NIP 19751205 200501 1 004	Kepala Dinas Sosial P3APKB  Martin Efendi, S.Hut. M. M NIP 19790905 200801 1 018
---	--	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2027

PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
KODE PROGRAM	5.02.02		
KEGIATAN	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
HASIL/ OUTPUT	TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Pengelolaan keuangan daerah perlu memperhatikan prinsip kesetaraan gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses : Belum tersedianya data terpilah gender dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Partisipasi : Partisipasi pegawai laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan belum terdokumentasi secara sistematis. Kontrol : Belum tersedia informasi mengenai keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah. Manfaat : Belum tersedia informasi mengenai keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah. b. Penyebab Internal Belum optimalnya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta belum tersedianya data terpilah gender dalam pelaksanaan kegiatan. c. Penyebab Eksternal Masih rendahnya pemahaman pentingnya data terpilah gender sebagai dasar penyusunan kebijakan dan evaluasi kinerja.		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
		Tujuan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		Alokasi	Rp.91.500.000.000,-
	Komponen/ Aktifitas 2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
		Tujuan	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak
		Alokasi	Rp.500.000.000,-
	Total Anggaran		Rp.92.000.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Milyar Rupiah)
Capaian Program		Out put - Terselenggaranya kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. - Tersedianya data pelaksanaan kegiatan yang memperhatikan aspek gender. - Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan berbasis gender.	

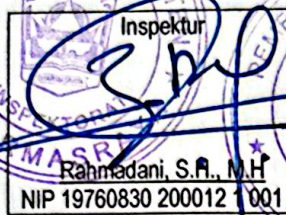
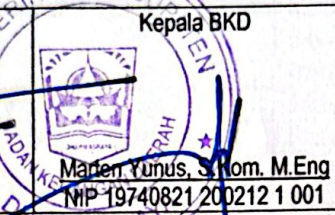
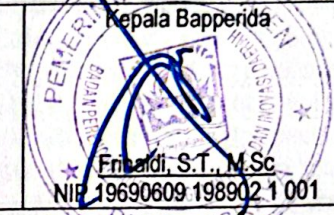
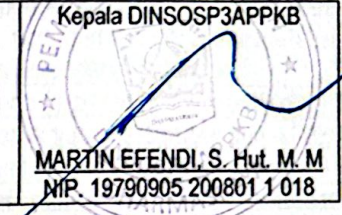
Out come

- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan responsif gender.
- Meningkatnya ketersediaan data terpilah gender sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Meningkatnya kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi pegawai laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pulau Pinang, 23 Juni 2026
Kepala BKD

Marden Yunus, S.Kom. M.Eng
NIP 19740821 200212 1 001

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapperida	Kepala DINSOSP3APPKB
 Rahmadani, S.P., M.H. NIP 19760830 200012 1 001	 Marden Yunus, S.Kom. M.Eng NIP 19740821 200212 1 001	 Firdadi, S.T., M.Sc. NIP 19690609 198902 1 001	 MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018

KAKTOR

Program		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Sasaran Program		Tata Kelola Anggaran
Kegiatan		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan BTT
	Gambaran Umum	Dana darurat dan mendesak diperlukan untuk mendukung penanganan keadaan darurat, bencana, dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya agar pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penggunaan dana darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
	Batasan Kegiatan	Pengelolaan dana darurat dan mendesak yang bersumber dari APBD Kabupaten sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Maksud dan Tujuan		Menjamin tersedianya dana darurat dan mendesak yang dapat digunakan secara cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam penanganan keadaan darurat dan kebutuhan mendesak daerah.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, verifikasi kebutuhan, penatausahaan, pencairan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana darurat dan mendesak.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Badan Keuangan Daerah dan wilayah Kabupaten sesuai lokasi kebutuhan penanganan darurat.
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Badan Keuangan Daerah melalui Sekretariat BKD
Jadwal		Januari – Desember 2027
Biaya		Rp.500.000.000,-

Pulau Punjung, 23 Juni 2026
Kepala BKD

Marten Yunus, S.Kom. M.Eng
NIP.197408212002121001



MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH

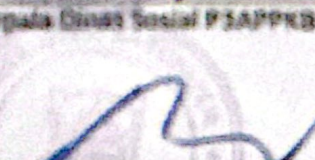
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak Tujuan : Menjamin ketersediaan dan pengelolaan dana darurat dan mendesak	Dalam kondisi darurat atau bencana, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas sering menghadapi kerentanan yang lebih tinggi. Data penerima manfaat dan dampak penggunaan dana darurat terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok rentan.	Akses : - Kelompok perempuan dan kelompok rentan belum seluruhnya memperoleh akses informasi terkait bantuan darurat. Partisipasi : - Keterlibatan perempuan dalam proses identifikasi kebutuhan darurat masih terbatas. Kontrol : - Perempuan memiliki keterlibatan yang lebih rendah dalam pengambilan keputusan terkait kebutuhan prioritas saat kondisi darurat. Manfaat :	Belum tersedia data terpilah gender dan kelompok rentan sebagai dasar perencanaan penggunaan dana darurat. Belum terdapat analisis gender dalam pengelolaan dana darurat dan mendesak.	Kondisi darurat menyebabkan keterbatasan akses informasi bagi perempuan dan kelompok rentan. Norma sosial masih membatasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan saat keadaan darurat.	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana darurat dan mendesak.	- Menyusun data penerima manfaat dana darurat yang terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok rentan. - Memasukkan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan dalam analisis penggunaan dana darurat. - Meningkatkan koordinasi dengan OPD teknis terkait data penerima manfaat. - Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana darurat berbasis gender.	Belum tersedia data penerima manfaat dana darurat yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga diperlukan penguatan sistem pendataan responsif gender	Input : - Tersedianya anggaran - Tersedianya data penerima manfaat terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok rentan. Output : - Tersusunnya pengelolaan dana darurat yang mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Monev	ISU GENDER			KEBLAKUHAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENCUKURAN HASIL	
		Faktor Kemiskinan	Selaku Kemiskinan Informasi	Selaku Kemiskinan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basik Data (Basis-Line)	Indikator Gender
secara cepak, tepat sasaran, akurat, dan rasional gender		Melihat pengakuan dan dampak dalam pembangunan terukur berdasarkan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan.						Outcome 1: Meningkatnya akses dan manfaat dari dampak bagi laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan secara adil dan proporsional.

Pulau Pangung, 25 Juni 2020
KEPALA BKD

Martus Tumpu, M.Eng
NIP 13740871 200212 1 001

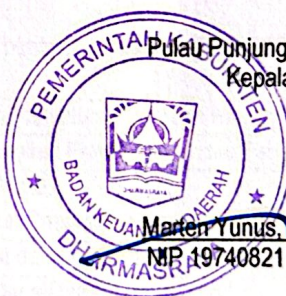
Tim Verifikasi			
Kepala BKD	Kepala BKD	Kepala Supperida	Kepala Dinas Sosial P3APPKB
 NIP 19740830 200212 1 001	 NIP 13740871 200212 1 001	 NIP 13740871 200212 1 004	 NIP 19740830 200212 1 018

KAKTOR

Program		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Sasaran Program		Tata Kelola Anggaran
Kegiatan		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan BTT
	Gambaran Umum	Dana darurat dan mendesak diperlukan untuk mendukung penanganan keadaan darurat, bencana, dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya agar pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penatausahaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penggunaan dana darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
	Batasan Kegiatan	Pengelolaan dana darurat dan mendesak yang bersumber dari APBD Kabupaten sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Maksud dan Tujuan		Menjamin tersedianya dana darurat dan mendesak yang dapat digunakan secara cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam penanganan keadaan darurat dan kebutuhan mendesak daerah.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, verifikasi kebutuhan, penatausahaan, pencairan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana darurat dan mendesak.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Badan Keuangan Daerah dan wilayah Kabupaten sesuai lokasi kebutuhan penanganan darurat.
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Badan Keuangan Daerah melalui Sekretariat BKD
Jadwal		Januari – Desember 2027
Biaya		Rp.500.000.000,-

Pulau Pinang, 23 Juni 2026
Kepala BKD

Marten Yunus, S.Kom. M.Eng
NP 19740821 200212 1 001



GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2027

PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
KODE PROGRAM	5.02.02		
KEGIATAN	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
HASIL/ OUTPUT	TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Pengelolaan keuangan daerah perlu memperhatikan prinsip kesetaraan gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses : Belum tersedianya data terpilah gender dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Partisipasi : Partisipasi pegawai laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan belum terdokumentasi secara sistematis. Kontrol : Belum tersedia informasi mengenai keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah. Manfaat : Belum tersedia informasi mengenai keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah. b. Penyebab Internal Belum optimalnya penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta belum tersedianya data terpilah gender dalam pelaksanaan kegiatan. c. Penyebab Eksternal Masih rendahnya pemahaman pentingnya data terpilah gender sebagai dasar penyusunan kebijakan dan evaluasi kinerja.		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
		Tujuan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
		Alokasi	Rp.91.500.000.000,-
		Anggaran	(Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah)
	Komponen/ Aktifitas 2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
		Tujuan	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak
		Alokasi	Rp.500.000.000,-
Anggaran		(Lima Ratus Juta Rupiah)	
Total Anggaran	Rp.92.000.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Milyar Rupiah)		
Capaian Program	Out put - Terselenggaranya kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. - Tersedianya data pelaksanaan kegiatan yang memperhatikan aspek gender. - Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan berbasis gender.		

	Out come • Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan responsif gender. • Meningkatnya ketersediaan data terpilah gender sebagai dasar pengambilan keputusan. • Meningkatnya kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi pegawai laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan kegiatan.
--	--

Pulau Punjung, 23 Juni 2026
Kepala BKD

Marten Yunus, S.Kom. M.Eng
NIP. 19740821 200212 1 001

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapperida	Kepala DINSOSP3APPKB
Rahmadani, S.H. M.H. NIP. 19760830 200012 1 001	Marten Yunus, S.Kom. M.Eng NIP. 19740821 200212 1 001	Frinaldi, S.T. M.Sc NIP. 19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018